

Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor

Dedi Suharyadi¹⁾ Rini Martiwi²⁾ Eulin Karlina³⁾

¹⁾ Program Studi Komputerisasi Akuntansi
AMIK BSI Bekasi
dedi.dsi@bsi.ac.id

²⁾ Program Studi Manajemen Administrasi
ASM BSI Jakarta
rini.ntw@bsi.ac.id

³⁾ Program Studi Komputerisasi Akuntansi
AMIK BSI Jakarta
eulin.eka@bsi.ac.id

Cara Sitasi: Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2018). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor. *Moneter*, 5(2), 7–14.

Abstract - *The implementation of regional autonomy makes each region has its own authority to regulate and manage all local government affairs as regulated by the Law. Thus, the region is also authorized to make local policies to create and improve people's welfare. The local revenue should also be able to support the needs of the region and even expected each year local revenue will always increase. The purpose of this study is to determine whether there is the influence of Regional Retributions and Regional Wealth Outcomes Separated to the Original Income either partially or simultaneously. The analytical method used is statistical analysis method using multiple linear regression. The result of this research shows that partial test shows that Levy does not have a significant effect to the original income of Bogor Regency. This is shown by t test where the significance value is greater than 0.05. As well as Local Levies, the Results of Management of Regional Wealth Is Separated also has no effect on the original income of Bogor regency. While testing simultaneously or collectively there is no effect of Local Retribution and Results Management of Regional Wealth Separated to Local Original Income. Based on the F test using the significance level of 5% or 0.05 can be seen that the value of significance 0.080 greater than 0.05 then it can be said there is no influence together between independent variables to the dependent variable*

Keywords: *Regional Retribution, Regional Wealth Outcomes Separated to the Original Income, Local Revenue*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang tersebar dengan berbagai suku dan budaya. Letak wilayah menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi dan pendapatan di masing-masing daerah mengalami perbedaan. Hal ini menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk dapat memanfaatkan segala aspek dalam upaya peningkatan terhadap penerimaan daerah. Diberlakukannya otonomi daerah membuat setiap daerah mempunyai kewenangan sendiri dalam mengatur dan mengelola semua urusan pemerintah daerah sebagaimana yang telah di atur oleh Undang-undang. Dengan demikian maka daerah juga berkewenangan membuat kebijakan daerah guna menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mencapai hal tersebut maka pendapatan asli daerah juga harus mampu menopang kebutuhan-kebutuhan daerah bahkan diharapkan tiap tahunnya pendapatan asli daerah akan selalu meningkat. Seperti halnya Kabupaten Bogor diberi keleluasaan dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya

sebagai wujud dari asas desentralisasi. Diantaranya retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, “bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu sumber keuangan daerah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah,

penerimaan daerah menuntut pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mengelola sumber pajak daerah tersebut dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Kabupaten Bogor yang merupakan bagian dari propinsi Jawa Barat terus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD. Berdasarkan data yang bersumber pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bogor, PAD memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Daerah setelah setelah Dana Perimbangan. Seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011-2016

Tahun	PAD	%	Dana Perimbangan	%	Lain-lain Pendapatan Daerah	%	Pendapatan Daerah
2011	685.121.399.928	20	1.781.177.918.858	52	985.455.796.519	28	3.451.755.115.305
2012	1.068.548.454.296	27	2.048.587.761.028	51	857.269.137.888	22	3.974.405.353.212
2013	1.261.034.564.121	28	2.310.876.711.691	50	1.000.421.091.002	22	4.572.332.366.814
2014	1.712.937.376.136	32	2.498.370.936.940	46	1.166.785.826.723	22	5.378.094.139.799
2015	2.002.320.991.117	33	2.583.489.732.475	43	1.447.148.183.146	24	6.032.958.906.738
2016	2.292.175.034.011	38	2.692.167.023.139	45	988.937.987.806	17	5.973.280.044.956

Sumber: Dispenda Bogor (Data Diolah)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor mengalami trend peningkatan dari tahun 2011 sampai 2016. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor terus meningkat dari yang 20% di tahun 2011 menjadi 38% di tahun 2016. Ini menjadi pencapaian yang baik untuk kabupaten yang berpusat di Cibinong.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dilihat dari APBD jenis pendapatan disetiap daerah dapat dibedakan menjadi tiga yaitu pendapatan

bersumber dari PAD, Bagian Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Adapun PAD dapat bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah (Waluyo, 2013). Sumber PAD berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Retribusi Daerah diatur berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, dimana retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

- Apakah terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bogor?
- Apakah terdapat pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bogor?
- Apakah terdapat pengaruh retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bogor?

1. Retribusi Daerah

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani dalam (Waluyo, 2013) menyebutkan bahwa Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Selain dari pajak, Retribusi juga menjadi salah satu sumber pendapatan bagi setiap daerah. Menurut UU no. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Beberapa ciri yang melekat pada Retribusi adalah sebagai berikut (Siahaan, 2005) :

- Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.

- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Angka (3) yang dimaksud dengan “hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan” antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan (Halim, 2008).

Jenis-jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meliputi objek pendapatan, yaitu :

- a. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah
- b. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank
- c. Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank
- d. Bagian Laba Penyertaan Modal atau Investasi

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dengan adanya otonomi daerah maka daerah mempunyai kewenangan sendiri dalam mengatur semua urusan pemerintah di luar urusan pemerintah pusat sebagaimana yang telah di atur oleh Undang-undang. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), setiap daerah tidak diperkenankan untuk:

- a. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- b. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor atau ekspor.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2002) . Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah

- c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- e. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2008).

Indikator keberhasilan perkembangan daerah direfleksikan oleh besar kecilnya PAD dalam membiayai pembangunan daerah. Potensi dana pembangunan yang paling besar dan lestari adalah bersumber dari masyarakat sendiri yang dihimpun dari pajak dan retribusi daerah (Siahaan, 2005).

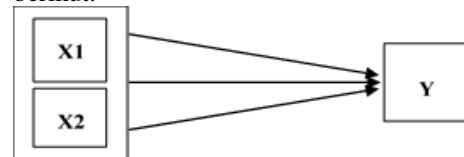
Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerahnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor tahun 2011 sampai dengan 2016.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2009:116). Jumlah sampel ini diambil dengan metode purposive sampling, artinya sampel dipilih berdasarkan pertimbangan subjektif penelitian yang memenuhi syarat yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi sebagai sampel, yakni retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang selalu ada selama tahun penelitian.

Variabel penelitian meliputi dua variabel bebas yaitu Retribusi Daerah (X1) dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X2), serta variabel terikat Pendapatan Asli Daerah (Y). Hubungan antara variabel penelitian tersebut dapat digambarkan dalam konstelasi masalah sebagai berikut:



Sumber: Konsep Diolah (2018)

Gambar 1.

Model Hubungan antar Variabel Penelitian

Keterangan:

X1 : Retribusi Daerah

X2 : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Y : Pendapatan Asli Daerah

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Menurut (Sugiyono, 2009) model regresi linier berganda dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana:

Y = Pendapatan Asli Daerah

X1 = Retribusi Daerah

X2 = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

a = konstanta

b1, b2= koefisien regresi

Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi, dalam output SPSS terletak pada tabel Model Summary dan tertulis R square berkisar nol sampai satu.

Untuk dapat memberi interpretasi terhadap kuatnya suatu hubungan, maka dapat digunakan pedoman sebagai berikut (Sugiyono, 2009)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis data menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengujian secara parsial menunjukkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berikut hasil pengujian dengan menggunakan alat bantu olah data IBM SPSS Statistics 21:

1. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bogor. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Beta (Asteria, 2015) serta Putri dan Rahayu (2015), yang membuktikan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 2. Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Std. Error	Sig.
(Constant)	3,730		14,541	,256
X1	,776	,856	,413	,907

a. Dependent Variable: Y

Sumber: (Sugiyono, 2009)
Berdasarkan hasil output SPSS untuk perhitungan regresi linear lihat pada hasil output coefficients di

kolom B yang menunjukkan constant = 3,730 dan X = 0,776, maka persamaan garis regresinya adalah $\hat{Y} = 3,730 + 0,776X_1$ digambarkan bahwa Konstanta (a) = 3,730 menunjukkan nilai konstan, dimana jika variabel Retribusi Daerah (X1) sama dengan nol (0) maka Pendapatan Asli Daerah (\hat{Y}) = 3,730. Koefisien regresi Retribusi Daerah (X1) sebesar 0,776 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar 1% maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami kenaikan sebesar 0,766.

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Hasil uji dapat dilihat pada tabel coefficients pada kolom sig (significance). Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa probabilitas nilai t atau signifikansi sebesar 0,416 lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dilihat dari kontribusinya, Retribusi Daerah merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) ketiga setelah Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah untuk Kabupaten Bogor. Jenis pos retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, sektor retribusi daerah merupakan sektor yang sangat penting untuk digali dan diperluas pengelolaannya, karena retribusi dipungut atas dasar balas jasa yang disediakan pemerintah.

Tabel 3. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,413 ^a	,170	,037	6,83486

a. Predictors: (Constant), X1

Sumber: data diolah (2018)

Berdasarkan tabel diatas nilai R Square atau R² sama dengan 0,170 atau 17% artinya perubahan Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan melalui Retribusi Daerah dan sisanya 83% dijelaskan variabel bebas lainnya. Dari hasil korelasinya (R) sebesar 0,413 atau 41,3 % dapat dikatakan bahwa Retribusi Daerah memiliki hubungan yang sedang dengan Pendapatan Asli Daerah.

2. Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bogor. Belum ada penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 4. Koefisien Variabel

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	8,090	4,828	1,676	,169
	X2	,515	,259	,705	,118

a. Dependent Variable: Y

Sumber: data diolah (2018)

Berdasarkan hasil output SPSS persamaan garis regresinya adalah $\hat{Y} = 8,090 + 0,515X_2$ digambarkan bahwa Konstanta (a) = 8,090 menunjukkan nilai konstan, dimana jika variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X2) sama dengan nol (0) maka Pendapatan Asli Daerah (\hat{Y}) = 8,090. Koefisien regresi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X2) sebesar 0,515 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X2) mengalami kenaikan sebesar 1% maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami kenaikan sebesar 0,515.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa probabilitas nilai t atau signifikansi sebesar 0,118 lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dilihat dari kontribusinya, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan penyumbang terkecil bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kabupaten Bogor.

Tabel 5. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,705 ^a	,497	,372	5,32035

a. Predictors: (Constant), X2

Sumber: data diolah (2018)

Berdasarkan tabel diatas nilai R Square atau R² sama dengan 0,497 atau 49,7% artinya perubahan Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan melalui Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan sisanya 50,3% dijelaskan variabel bebas lainnya. Dari hasil korelasinya (R) sebesar 0,705 atau 70,5 % dapat dikatakan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan memiliki hubungan yang kuat dengan Pendapatan Asli Daerah.

3. Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Variabel independen yaitu Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang dimasukkan dalam model tidak mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 6. ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	183,285	2	91,643	6,551	,080 ^b
Residual	41,966	3	13,989		
Total	225,252	5			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: data diolah (2018)

Berdasarkan tabel Anova atau uji F diatas dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5% atau 0,05 dapat dilihat bahwa Ftabel dengan taraf signifikansi 5% dan df pembilang = 2, serta df penyebut 6, maka Ftabel= 9,552. Dengan demikian Fhitung (6,551) lebih kecil dari Ftabel (9,552). Dilihat dari nilai signifikansi 0,080 lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan tidak terdapat pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen yaitu Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 7. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,902 ^a	,814	,689	3,74016

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: data diolah (2018)

Berdasarkan tabel diatas nilai Adjusted R Square atau R² sama dengan 0,689 atau 68,9% artinya perubahan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan melalui kedua variabel independen yaitu Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, sedangkan sisanya 0,311 atau 31,1% dijelaskan oleh variabel bebas lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Untuk analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	11,258	9,220	
1	X1	1,079	,478
	X2	,597	,185

a. Dependent Variable: Y

Sumber: data diolah (2018)

Dari tabel koefisien dapat dibuat persamaan regresi linier berganda $\hat{Y} = 11,258 + 1,079X1 + 0,597X2$ digambarkan bahwa Konstanta (a) = 11,258 menunjukkan nilai konstan, dimana jika variabel Retribusi Daerah (X1) dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X2) = 0 maka Pendapatan Asli Daerah (\hat{Y}) = 11,258. Koefisien regresi Retribusi Daerah (X1) sebesar 1,079 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar 1% maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami kenaikan sebesar 1,079. Nilai koefisien positif menjelaskan terdapat hubungan positif antara Retribusi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Koefisien regresi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X2) sebesar 0,597 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mengalami kenaikan sebesar 1% maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami kenaikan sebesar 0,597. Nilai koefisien positif menjelaskan terdapat hubungan positif antara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor.
2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor.
3. Secara simultan atau secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor diharapkan dapat lebih meningkatkan kemampuan dalam penerimaan daerah, khususnya Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dengan terus menggali potensi daerah baik itu menambah maupun mengembangkan jenis-jenis Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang sesuai dengan kepentingan daerah.

REFERENSI

- Asteria, B. (2015). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen*, 2(1), 51 – 61.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Undip.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Siahaan, M. P. (2005). *Pajak Daerah dan Distribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2018). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor. *Moneter*, 5(2), 7–13.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

PROFIL PENULIS

Dedi Suharyadi, SE, MM. Lahir di Curup dan menyelesaikan study S2 di tahun 2012 dengan program studi Magister Manajemen pada Universitas BSI Bandung. Mulai bergabung di Bina Sarana Informatika dari tahun 2009 sampai dengan sekarang.

Rini Martiwi, SS, MM. Lahir di Jakarta dan saat ini aktif mengajar sebagai dosen di Akademi Sekretari dan Manajemen (ASM) BSI Jakarta dan Akademi Bahasa Asing (ABA) BSI Jakarta. Selain mengajar juga terdaftar sebagai anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) sejak tahun 2017.

Eulin Karlina, S.Pd, MM, menyelesaikan S2 tahun 2012 dengan program studi Magister Manajemen pada Universitas BSI Bandung. Bekerja di Bina Sarana Informatika dari tahun 2010 sampai sekarang.